

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdesaan yang merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa beserta jajarannya. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Triyanto dkk., 2022). Kebijakan pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) digolongkan dalam klaster-1 bersama program bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) atau yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat dengan nama Askeskin untuk perawatan kesehatan gratis, program beasiswa untuk siswa miskin, serta program bantuan untuk kelompok yang rentan sosial lainnya, lalu program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga dengan menysasar pada pemberdayaan kelompok masyarakat dan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil berupa pemberian modal dalam bentuk kredit usaha rakyat (Djako dkk., 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 mengungkapkan bahwa dibandingkan tiga bulan terakhir tahun 2019, PDB Indonesia menyusut sebesar 1,01% pada tiga bulan pertama tahun 2020 (Nihayah & Rifqi, 2022). Hingga Agustus 2023, Badan Pusat Statistik menyatakan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 5,32% (BPS, 2023). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nagari Sungai Buluah mencapai 6,69% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022. Kemiskinan yang banyak terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan hingga akhir Maret 2023, terdapat 25,9 juta orang yang hidup dalam kemiskinan. Pemerintah masih berupaya mencari solusi terhadap permasalahan kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai oleh Dana Desa (BLT – DD) sesuai Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah. telah dibuat untuk mengatasi masalah ini (Purnama dkk., 2024).

Nagari Sungai Buluah merupakan nagari atau desa yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.447 jiwa pada tahun 2022 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 628 KK. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk Nagari Sungai Buluh pada tahun 2022 disalurkan kepada 166 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran BLT ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Penduduk di Nagari Sungai Buluah rata-rata bermatapencaharian sebagai petani dan berkebun. Selain itu yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Nagari Sungai Buluah adalah tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan. Besaran BLT-DD di Nagari Sungai Buluah sebesar Rp. 300.000 per bulannya atau tiga bulan satu kali dengan jumlah Rp. 900.000 per KK.

Penetapan penerima bantuan BLT harus dilakukan secara tepat dan akurat. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pengelolaan data warga yang berhak mendapatkan bantuan karena masih menggunakan sistem manual sehingga terjadi kekeliruan yang dapat mengakibatkan bantuan yang disalurkan tidak tepat, seperti masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan namun tidak menerimanya, atau sebaliknya sehingga menimbulkan efek keributan yang membuat masyarakat yang merasa dirinya pantas mendapat bantuan melakukan protes ke pemerintah desa. Selain itu, masalah yang sering terjadi yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat setempat tentang kriteria-kriteria penetapannya. Dari permasalahan tersebut perlu adanya sistem penunjang keputusan yang berguna untuk menentukan masyarakat yang layak atau yang berhak dalam mendapatkan bantuan tersebut (Charmiliani Besa, 2025).

Pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini menjadi sebuah solusi pemerintah desa dalam mendapatkan sistem pendukung keputusan untuk penerima bantuan BLT dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) (Muarif dkk., 2025). Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering juga dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot. Metode SAW ini dapat menghitung penilaian dengan mencari penjumlahan terbobot. Sedangkan berbasis web karena aplikasi ini sangat mudah untuk diakses semua orang hanya dengan jaringan internet (Charmiliani Besa, 2025).

Adanya permasalahan terhadap penerimaan bantuan BLT seperti penjelasan diatas dan adanya metode *Simple Additive Weighting* (SAW) maka peneliti tertarik untuk membuat suatu sistem informasi yang berjudul Perancangan Sistem Penunjang

Keputusan Dalam Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Sungai Buluah Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan permasalahan:

1. Bagaimana merancang sebuah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) untuk membantu Wali Nagari Sungai Buluah dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan akurat?
2. Bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar hasil keputusan lebih akurat dan tepat sasaran?
3. Bagaimana data penentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diolah dengan cepat dan dapat disimpan dengan baik dan aman?

1.3. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka didapatkan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara permasalahan yang ada:

1. Diharapkan dengan merancang sebuah Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang dapat mengatasi masalah semi terstruktur untuk membantu Wali Nagari Sungai

Buluah Induk dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan akurat.

2. Dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang dapat melakukan penjumlahan terbobot setiap kriteria penilaian dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada kantor Wali Nagari Sungai Buluah agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan *database* MySQL data data penentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diolah dengan cepat dan dapat disimpan dengan baik dan aman.

1.4. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam laporan tidak terlalu luas, peneliti perlu memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SPK ini dibuat dengan ruang lingkup penentuan layakanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor Wali Nagari Sungai Buluah yang bertujuan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Sistem Pengambilan keputusan (SPK) ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam perancangan sistem penunjang keputusan pada pemerintah Nagari Sungai Buluah adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem penunjang keputusan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL.
2. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran dan efisien.
3. Mempermudah pegawai kantor Wali Nagari Sungai Buluah dalam pemilihan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih efisien dan lebih tepat sasaran.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam perancangan sistem penunjang keputusan pada pemerintah Nagari Sungai Buluah Induk adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam membangun sistem informasi.
 - b. Sebagai sarana bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan di bidang ilmu komputer.
 - c. Sebagai acuan bagi peneliti dalam mengembangkan sistem yang lebih baik
2. Bagi Kampus

- a. Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
 - b. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam melakukan penelitian.
3. Bagi Desa/Nagari
- a. Untuk mempermudah Desa/Nagari dalam menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini secara tepat dan akurat
 - b. Untuk menghindari kesalahan dalam penerimaa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 - c. Menghasilkan keputusan yang objektif.
 - d. Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan khusus dalam pembuatan Sistem Informasi.

1.7. Tinjauan Umum Pemerintah Nagari Sungai Buluah

Nagari Sungai Buluah sangat membutuhkan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) untuk mempermudah pihak pemerintah nagari dalam menentukan masyarakat yang layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan adanya Sistem Penunjang Keputusan (SPK) tersebut pemerintah nagari dapat menentukan masyarakat yang layak mendapatkan dana tersebut secara tepat, akurat dan efisien.

1.7.1. Sejarah Umum Pemerintah Nagari Sungai Buluah

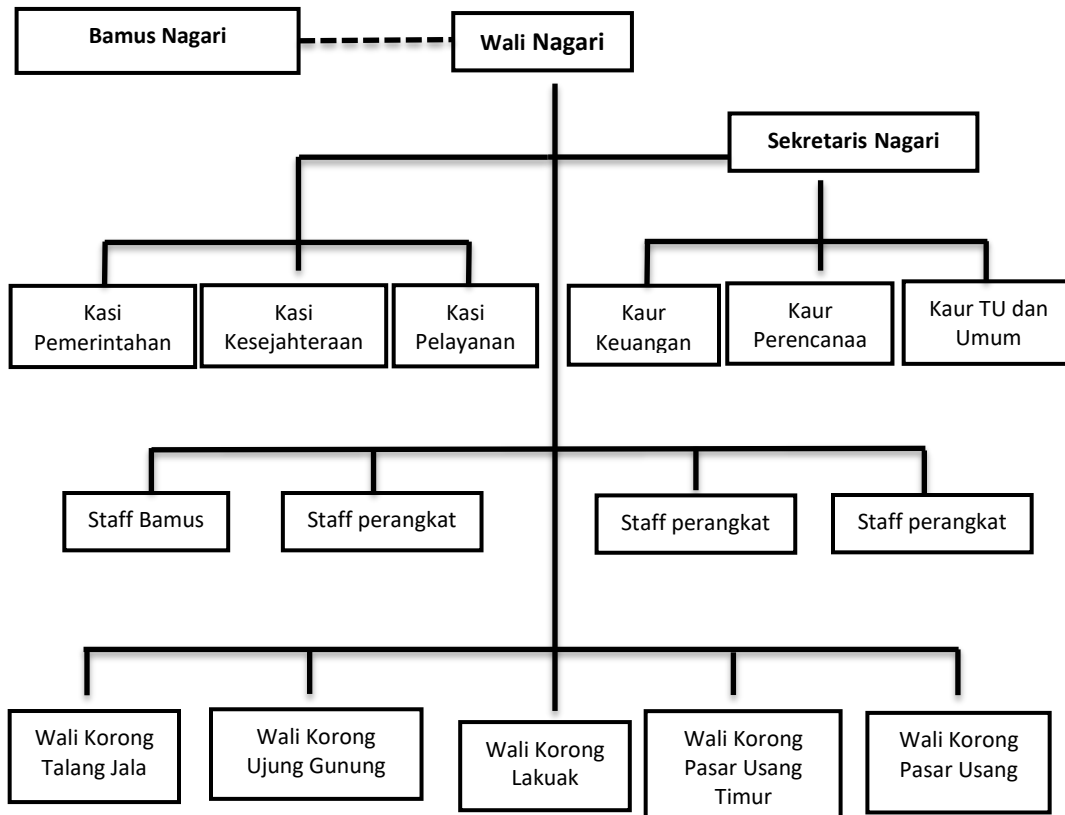
Nagari Sungai Buluah merupakan salah satu nagari di Kecamatan Batang

Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, memiliki sejarah pemerintahan yang panjang dan kaya, berakar kuat pada adat dan tradisi Minangkabau. Luas wilayah Nagari Sungai Buluah diperkirakan sebesar 68,08 kilometer persegi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wali nagari Sungai Buluah, bahwa Kenagarian Sungai Buluah memiliki batas wilayah yang lain, diantaranya yaitu:

- a. Sebelah Utara memiliki batas wilayah yaitu Nagari Sungai Buluh Utara
- b. Sebelah Selatan memiliki batas wilayah yaitu Nagari Sungai Buluh Selatan
- c. Sebelah Timur memiliki batas wilayah yaitu Nagari Sungai Buluh Timur
- d. Sebelah barat memiliki batas wilayah yaitu Nagari Sungai Buluh Timur

Struktur pemerintahan Nagari Sungai Buluah terdiri dari wali nagari sebagai kepala pemerintahan, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai lembaga perwakilan, serta perangkat nagari lainnya seperti sekretaris nagari dan kepala-kepala jorong (korong). Nagari Sungai Buluah juga memiliki Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menjaga adat dan budaya setempat.

1.7.2. Struktur Pemerintah Nagari Sungai Buluah Selatan



Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Buluah , Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 1.1 Struktur Pemerintah Nagari Sungai Buluah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Nagari Sungai Buluah dipimpin oleh Wali Nagari yang berdampingan dengan Badan Permusyaratan Nagari (Bamus Nagari) yang bertugas menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari. Dalam melaksanakan tugasnya, wali nagari juga dibantu oleh sekretaris nagari, beberapa kepala bagian beserta staff dalam

menjalankan pemerintahan nagari. Nagari Sungai Buluah memiliki Korong atau Kampung yang dipimpin oleh wali korong.

1.7.3. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas masing – masing bagian struktur Pemerintah Nagari Sungai Buluah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Wali Nagari, Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada pada Nagari tersebut
2. Sekretaris, Bertugas memverifikasi semua kegiatan yang ada pada Nagari tersebut
3. Kaur/Kasi, Memiliki tanggung jawab atas atas semua kegiatan kaur dan kasi
4. Staff, Bertugas membantu Kaur/Kasi di Nagari tersebut
5. Wali Korong, Bertugas dalam melayani masyarakatnya masing – masing dan bertanggung jawab langsung ke Wali Nagari